

**EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

**RINA ANGRANI
10573 05124 14**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ENREKANG**

**RINA ANGRANI
105730512414**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

“Tuhan tidak menuntut kita agar sukses, Dia hanya meminta kita untuk mencoba”

Usaha adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Bersabar merupakan bekal untuk meraih cita-cita. Semangat adalah Kekuatan.. Tapi, dari itu semua Doa dan penyerahan diri kepada Tuhan adalah hal yang paling utama, karena semua hal dalam hidup adalah milik Tuhan

Saya belum mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan berupa materi, namun dengan segala kerendahan hati, inilah hal kecil yang kuharapkan bisa membahagiakan mereka.

Karya ini kudedikasikan

kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini dengan penuh cinta, kasih sayang dan tanpa kenal lelah mendoakan, memberikan nasihat, semangat serta kerja keras yang tak ternilai harganya untuk mendukung setiap langkahku. Juga untuk adik-adikku tersayang,

Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi dari kalian semua



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang"
Nama : Rina Angriani
No. Stambuk : 105730512414
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah mengikuti ujian skripsi pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 bertempat di ruangan 8.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

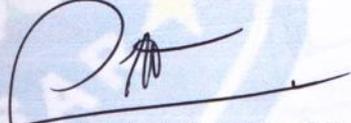
Makassar, 6 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NIDN: 0922027901

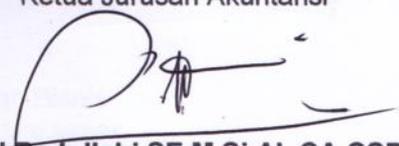

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078


Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

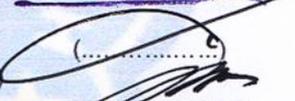
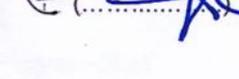
Skripsi atas Nama **RINA ANGRANI**, NIM : **105730512414**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0009/SK-Y/62201/091004/2018M. Tanggal 26 Muharram 1440H/ 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H

Makassar,

6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak. CA 
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA. CSP 
3. Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si. 
4. Samsul Rizal, SE., MM. 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM

NBM : 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Angriani
Stambuk : 105730512414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji pada tanggal 6 Oktober 2018
adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh
siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

26 Muharram 1440 H
Makassar,

6 Oktober 2018 M

Yang membuat pernyataan,



Rina Angriani

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi



Ismail Rasulong, SE. MM
NBM : 903 078

Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian yang berjudul “**Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang**”, tepat pada waktunya walaupun dengan berbagai rintangan dan hambatan. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqamah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat kesabaran dan ketekunan serta bantuan rekan-rekan yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini, hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik dalam bentuk yang sederhana.

Menyadari bahwa Skripsi penelitian ini masih jauh dari sempurna, sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan manusia yang tak luput dari kekhilafan/kesalahan. Sehubungan dengan itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda **Umar** dan Ibunda **Nurmayani** serta Saudara saya yang senantiasa mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada :

1. Dr H Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE., MM selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi UNISMUH
7. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang waktu dan kesediannya memberikan data yang diperlukan penulis
8. Adik terbaik saya Yulianti yang setia menemani dari penelitian sampai penyusunan skripsi
9. Sahabat- sahabatku : Ida, Fitra, Yuyu, Ningsih, Dhia, Ani dan Dija persahabatan kita yang termanis dibandingkan apapun

Menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan skripsi ini.

Makassar, Oktober 2018

Rina Angriani

ABSTRAK

Rina Angriani, Tahun 2018 **Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang**. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Edi Jusriadi dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran dan pengeluaran aktual pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk tahun 2016 sampai tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan membandingkan anggaran dengan pengeluaran tahun 2016 sampai tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis komparatif selama dua tahun anggaran, menunjukkan ada ketidakstabilan dalam realisasi. Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya nilai pagu anggaran, kurangnya koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kepada pelaksana kegiatan dan kegiatan non-kinerja.

Kata kunci : Evaluasi, Laporan pertanggungjawaban, Anggaran

ABSTRACT

*Rina Angriani, 2018 **Evaluation of Accountability Report on the Use of Budget at the Health Office of Enrekang District.** Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Edi Jusriadi and Advisor II Ismail Badollahi.*

This study aims to analyze the actual budget and expenditure at the Enrekang District Health Office for 2016 to 2017. The analysis used is quantitative analysis by comparing the budget with expenditure in 2016 to 2017 at the Enrekang District Health Office. The results show that comparative analysis over the two budget years shows that there is instability in realization. Absorption of the budget cannot be implemented optimally due to various factors such as the high value of the budget ceiling, the lack of coordination between the technical implementing officials and the executors of non-performance activities and activities. Absorption of the budget cannot be implemented optimally due to various factors such as the high value of the budget ceiling, the lack of coordination between the technical implementing officials and the executors of non-performance activities and activities.

Keywords: Evaluation, Accountability Report, Budget

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Evaluasi.....	7
1. Pengertian Evaluasi.....	7
2. Tujuan Evaluasi	9
3. Tahapan-Tahapan Evaluasi.....	10
B. Laporan Pertanggungjawaban.....	11

1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban	11
2. Peranan Laporan Keuangan	13
3. Tujuan Laporan Keuangan	15
C. Anggaran.....	22
D. Tinjauan Empiris.....	27
E. Kerangka Konsep	39
F. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Enrekang	43
B. Visi & Misi Dinas Kesehatan Enrekang.....	43
C. Struktur Organisasi.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang	47
2. Penyajian Data Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	48
B. Pembahasan	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016	49
Tabel 5.2 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Enrekang	46
Gambar 5.1 Flowchart Pertanggungjawaban FKTP Non-BLUD	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu organisasi besar, seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan subdinas-subdinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material dan sebagainya dan dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu.

Perencanaan dan penganggaran yang baik diartikan sebagai fungsi utama dalam manajemen pembangunan. Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang baik kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan harapan untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang optimal dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pencapaian hasil yang optimal tersebut sangat diperlukan sebuah laporan yang mampu memberikan suatu informasi kejadian dan peristiwa yang disusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu yang berisikan data-data baik data yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Sehingga dengan adanya data tersebut

mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, kontrol, dan evaluasi dari penganggaran yang telah direncanakan bersama dan sudah tentu dengan harapan untuk pencapaian tujuan yang sesuai dan tepat sasaran oleh suatu organisasi, perusahaan dan instansi tertentu.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi perbendaharaan suatu instansi untuk merencanakan langkah-langkah finansial penting serta menentukan kebijakan instansi dimasa depan dalam periode tertentu. Hal tersebut sejalan dengan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu aspek penting dalam merencanakan keputusan yang akan diambil oleh bendaharawan, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau ketidaktepatan dalam merencanakan atau melaksanakan anggaran dapat berakibat buruk pada instansi. Ketidaktepatan atau adanya selisih antara anggaran dan realisasinya juga terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (*role setting*) dalam usaha pencapaian sasaran instansi. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas. Dalam pencapaian sasaran perusahaan, ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang

peran untuk memungkinkan perbendaharaan berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap bendahara yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi bendahara yang diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran (*role sending device*) kepada bendahara yang diberi peran dalam pencapaian sasaran instansi.

Anggaran dapat menjadi alat pengendalian bendahara instansi, pengendalian tersebut meliputi kegiatan untuk membandingkan hasil aktual (realisasi) dengan rencana yang dianggarkan serta mengambil tindakan koreksi atau umpan balik. Sehingga apabila terjadi perbedaan antara realisasi dengan dana yang dianggarkan dapat diketahui perbedaan tersebut masih dalam batas-batas pengendalian perbendaharaan atau tidak. Jika diluar pengendalian perbendaharaan maka harus dicari penyebab-penyebab agar dapat diambil tindakan korektif untuk menyeimbangkan antara realisasi dan anggaran.

Fenomena yang terjadi pada penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Enrekang ternyata masih lemah, terlihat dari pola penyerapan anggaran yang masih cenderung menumpuk diakhir tahun anggaran.

Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan pekerjaannya sesuai target yang ditetapkan. Ini membuktikan beberapa kinerja SKPD Kabupaten Enrekang dinilai buruk. Faktor-faktor ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak hati-hati, adanya pemborosan atas biaya yang tidak perlu, penggunaan sumber daya yang tidak memadai serta pencapaian target dan kebijakan yang tidak tepat. Akibatnya banyak program SKPD yang tidak diselesaikan dengan baik. Lemahnya perencanaan kegiatan akibat para satuan kerja yang kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun tidak optimal. Kinerja SKPD dapat dilihat dari seberapa mampu mencapai target dan presentase fisik dan keuangan program/kegiatan.

Berikut ini merupakan data laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2016 – 2017 :

Tabel 1 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang pada tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
TW I	63.148.920.220	1.415.697.352	2,24%
TW II	65.668.227.220	9.420.357.132	14,34%
TW III	65.668.227.220	20.417.643.177	32 %
TW IV	66.135.912.239	55.696.933.693	84,2%
Jumlah	260.621.286.899	86.950.631.354	34 %

Berdasarkan data pada tabel 1 anggaran sebesar Rp 260.621.286.899 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.950.631.354 atau sebesar 34%. Masih ada penyerapan anggaran yang masih tidak terlaksana secara maksimal karena berbagai alasan, seperti tidak terlaksananya kegiatan, tingginya nilai pagu anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian

anggaran pada akhir tahun serta secara langsung akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran.

Tabel 2 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
TW I	45.534.196.312	1.064.091.600	2,33 %
TW II	45.534.196.312	8.154.241.796	18 %
TW III	45.534.196.312	10.260.806.329	23%
TW IV	45.534.196.312	39.777.081.661	87,3 %
Jumlah	182.136.785.248	59.256.221.386	33 %

Berdasarkan data pada tabel 2 anggaran sebesar Rp 182.136.785.248 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.256.221.386 atau sebesar 33%. Masih ada penyerapan anggaran yang masih tidak terlaksana secara maksimal karena berbagai alasan, seperti tidak terlaksananya kegiatan, tingginya nilai pagu anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian anggaran pada akhir tahun serta secara langsung akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah di dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis, sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, dan sebagai masukan pada instansi dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif. Menurut Larry, 2006 (dalam Suwandi, 2017) evaluasi atau penilaian kinerja adalah proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian isi

(*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Whittaker, 2006 (dalam Suwandi 2017) evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Robertsoon, 2002 (dalam Hidayat, 2015) penilaian kinerja atau evaluasi adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Wahyudi (2012:101) evaluasi adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Menurut Wirawan, dalam buku Abdulloh (2014:5) menyatakan bahwa evaluasi atau penilaian kinerja adalah sebuah proses penilaian oleh penilai (pejabat) yang melakukan penilaian (*apparasial*) mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai (pegawai) yang dinilai (*apparaise*) yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkan standar kinerjanya secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia.

Kesuksesan organisasi akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik dalam konteks organisasi sektor publik.

Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Menurut Mahsun,2006 (dalam Hidayat,2015) pada organisasi sector publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat *abstrak* sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja. Dengan kata lain tidaklah mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama *pure non profit* seperti pemerintah, khusus untuk organisasi pemerintah, selama ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif.

Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah, lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar (ukuran mutu). Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari evaluasi akan memberitahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.

2. Tujuan Evaluasi

Menurut Badriyah (2015) penilaian kinerja/evaluasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi terhadap tujuan organisasi
 1. *Feedback* pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka
 2. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut
 3. Membantu manajemen untuk membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan
 - b. Pengembangan tujuan organisasi
 1. Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang
 2. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir
 3. Memotivasi pekerja
3. Tahapan-tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan :
- a. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya
 - b. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

- c. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- d. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- e. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

B. Laporan Pertanggungjawaban

1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerbitan pedoman standar akuntansi pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan good governance melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh semua instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat maupun di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakteraturan ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disampaikan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan.

Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan pasal 184 ayat (2) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

2. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat penting bagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Berikut peranan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atau seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

d. Keseimbangan antaragenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan menentukan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

3. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para penggunaan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
- b. kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- d. Menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- e. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- f. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu: basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*).

Akuntansi berbasis kas yaitu transaksi ekonomi dan kejadian lain yang diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (kas umum negara/kas

umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum negara/kas umum daerah). Sedangkan akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan surat keputusan penetapan pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atau pendapatan pajak tersebut.

Sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja Negara paling lambat tahun anggaran 2008.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN/APBD, dimana dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per 31 desember untuk neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 desember untuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan arus kas (LAK).

Tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun dapat terjadi pada situasi tertentu, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam kondisi seperti itu entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komproraif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan intern, yaitu setidaknya-tidaknya setiap semester sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran kementerian Negara/lembaga dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun

2006 tentang pelaporan keuangan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian Negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat atau daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidaknya terdiri dari :

1. Laporan Realisasi APBN

Laporan realisasi APBN mengungkap berbagai kegiatan keuangan pemerintah untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Laporan realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan (LRA), Belanja, Transfer, dan Pembiayaan (*financing*). Selain itu juga disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset baik lancar maupun tidak lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat Kementerian/Lembaga. Dalam neraca tersebut harus diungkapkan semua pos asset dan kewajiban yang didalamnya termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah uang yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional, terdiri dari Pendapatan (LO), Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan,

pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Laporan arus kas ditujukan untuk memberikan informasi mengenai arus masuk dan ke keluar kas dari pemerintah dalam suatu periode laporan. Laporan Arus Kas diperlukan untuk memberi informasi kepada para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas pemerintah. Disamping itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap gubernur/ bupati/walikota wajib menyusun dan menyajikan keempat laporan keuangan diatas. Sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (bendahara umum Negara/kuasa bendahara umum Negara dan bendahara umum daerah/kuasa umum daerah). Dengan demikian kepala SKPD sebagai entitas akuntansi tidak menyusun dan menyajikan laporan arus kas.

Disamping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan keuangan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/deficit selama satu periode yang disusun berdasarkan berbasis akrual. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode.

C. Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat bantu perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu perusahaan. Anggaran juga merupakan suatu perencanaan yang terperinci untuk setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan yang dapat digunakan dalam menunjang efektivitas pengendalian.

Setiap aktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya

akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan usahanya. Rencana-rencana perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usahanya perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Anggaran organisasi perusahaan merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu, pada hakikatnya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para manajer atau pimpinan perusahaan bersama karyawannya. Anggaran ini akan digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengertian anggaran organisasi perusahaan dan anggaran pemerintah sebenarnya tidak jauh berbeda, baik dalam proses penyusunan maupun dalam tujuannya. Demikian pula dalam hal penerimaan dan pengeluaran, baik anggaran organisasi perusahaan atau anggaran pemerintah keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah uang akan dikeluarkan atau didapat dalam periode satu tahun anggaran sehingga dapat lebih terkendali.

Menurut Nafarin (2013) anggaran yaitu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Sasongko dan Parulian (2015) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara

kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Menurut Suharsimi (2012) anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan rangkaian atau kegiatan tindakan dan disusun secara sistematis yang meliputi segala kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di waktu yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2013) beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sector publik sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang otonom karena mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri dan berbeda dengan sasaran serta tata kerja sistem di perusahaan, tetapi dapat dianggap sebagai subsistem, yaitu bagian dari sistem yang lebih besar. Anggaran

yang disusun melibatkan semua pihak pada tingkatan manajemen dalam penyusunan programnya. Penyusunan anggaran ini dilakukan bersama, mulai dari pimpinan beserta staff keuangan dalam instansi tersebut. Sehingga manajemen menetapkan bahwa anggaran yang telah disahkan merupakan suatu komitmen atau kesanggupan untuk melaksanakan rencana yang telah dianggarkan demi menjalankan operasional instansi. Biasanya sebuah dinas instansi menggunakan beberapa dasar penyusunan perencanaan anggaran yaitu :

a. Anggaran Tahun Lalu

Salah satu pertimbangan di dalam penyusunan anggaran tahun yang akan datang adalah anggaran tahun-tahun yang sudah lewat.

b. Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi tahun berjalan merupakan hal yang paling penting diperhatikan dalam menyusun anggaran, karena angka-angka dalam realisasi merupakan data yang akurat.

c. Ramalan yang Akan Datang

Ramalan yang dimaksud adalah hal-hal yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang yang disesuaikan, sehingga anggaran yang disusun nantinya mendekati realisasi yang diinginkan.

Adapun tujuan penyusunan anggaran adalah :

- a. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
- b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

- c. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
- d. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
- e. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu-tidaknya tindakan koreksi.

Berikut ini diuraikan perbedaan karakteristik anggaran dengan prakiraan (forecast). Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran
- d. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
- e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan

Prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain keuangan
- b. Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu
- c. Penyusunan prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diperkirakan
- d. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi
- e. Prakiraan akan selalu dimutakhirkan jika informasi baru menunjukkan perubahan kondisi
- f. Penyimpangan dari yang diperkirakan tidak dianalisis secara formal atau secara penyusunan prakiraan melakukan analisis terhadap penyimpangan

D. Tinjauan Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dibawah ini, yakni oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2013) tentang “Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur”. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ daftar pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas Kesehatan 2011-2015 karena program yang dilaksanakan pada dokumen

RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian yang dilakukan Bambang Pamungkas (2014) tentang “Evaluasi Implementasi Anggaran Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dimana hasil penelitiannya yaitu dalam penyampaian pembuatan anggaran belanja yang dilaksanakan tepat waktu masih mempunyai beberapa hambatan yaitu luas wilayah, jumlah kegiatan, SDM, data base yang kurang valid dan system aplikasi anggaran yang sering berubah.

Penelitian yang dilakukan Riswan Yudhi Fahrita dan Viani Carolina (2013) tentang “Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja atau dengan kata lain tidak ada realisasi anggaran belanja yang melebihi dari anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Intihanah dan Sulvariani Tamburaka (2017) “Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian prosedur dan pelaporan keuangan daerah telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dimana bendahara penerimaan telah melakukan penatausahaan menggunakan surat tanda setoran (STS) yang telah diotorisasi oleh pihak

bank dan berdasarkan STS tersebut bendahara penerimaan membuat laporan penerimaan secara administratif.

Penelitian yang dilakukan Eni Parayanti (2015) tentang “ Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan seperti struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/pembukuan, klasifikasi, kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

“Abdul Latif” (2014) tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo”. Metode analisis yang digunakan analisis berganda. Hasil penelitian partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keikutsertaan aparat dalam melakukan usulan kegiatan dari masyarakat, usulan SKPD, melaksanakan penyusunan anggaran dengan sungguh-sungguh, penanganan penyusunan anggaran, kebijakan umum anggaran dan hasil program kegiatan penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya

anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan Santi Suarsih dan Deni Kurniadi (2017) tentang “ Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan”. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian kebijakan dana desa telah dijalankan di Kabupaten Malinau, akan tetapi pelaksanaannya untuk pembangunan kesehatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) kondisi geografis, faktor ekonomi, sosial dan budaya serta status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan kesehatan, 2) pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kesehatan masih rendah, 3) tidak adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di beberapa desa di Kabupaten Malinau.

Penelitian yang dilakukan Taufik Kurohman (2013) tentang “ Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten Jawa Timur”. Metode analisis yang digunakan yaitu uji beda. Hasil penelitian pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Penelitian yang dilakukan Bastyo Cesna Ernanto (2015) tentang “Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya (Studi Kasus di URKEU AKPOL Semarang). Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian

penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik. Tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian biaya adalah membandingkan antara anggaran biaya dan realisasi biaya.

Penelitian yang dilakukan Nisrinah Laila Qadriyanti (2013) tentang "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti/Tahun	Judul penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Mulyadi (2013)	Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja pada Dinas Kesehatan Kab Kutai Timur	deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) / daftar pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas Kesehatan 2011-2015 karena program yang dilaksanakan pada dokumen RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
2	Bambang Pamungkas (2014)	Evaluasi Implementasi Anggaran Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	deskriptif	Dalam penyampaian pembuatan anggaran belanja yang dilaksanakan tepat waktu masih mempunyai beberapa hambatan yaitu luas wilayah, jumlah kegiatan, SDM, data base yang kurang valid dan sistem aplikasi anggaran yang sering berubah.
3	Riswan Yudhi Fahrianta dan Viani Carolina (2013)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	deskriptif	Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja atau dengan kata lain tidak ada realisasi anggaran belanja yang melebihi dari anggaran belanja yang telah ditetapkan.

4	Intihanah dan Sulvariani Tamburaka (2017)	Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari	deskriptif	Prosedur dan pelaporan keuangandaerah telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dimana bendahara penerimaan telah melakukan penatausahaan menggunakan surat tanda setoran (STS) yang telah diotorisasi oleh pihak bank dan berdasarkan STS tersebut bendahara penerimaan membuat laporan penerimaan secara administratif.
5	Eni Parayanti (2015)	Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	deskriptif	Pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan seperti struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/pe mbukuan, klasifikasi, kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

6	Abdul Latif (2014)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Dan Evaluasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Analisis berganda	Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keikutsertaan aparat dalam melakukan usulan kegiatan dari masyarakat, usulan SKPD, melaksanakan penyusunan anggaran dengan sungguh-sungguh, penanganan penyusunan anggaran, kebijakan umum anggaran dan hasil program kegiatan penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai.
7	Santi Suarsih dan Deni Kurniadi (2017)	Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan	deskriptif	Kebijakan dana desa telah dijalankan di Kabupaten Malinau, akan tetapi pelaksanaannya untuk pembangunan kesehatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) kondisi geografis, faktor ekonomi, sosial dan budaya serta status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan kesehatan, 2) pemanfaatan danadesa untuk pembangunan kesehatan

				masih rendah, 3) tidak adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di beberapa desa di Kabupaten Malinau
8	Taufik Kurrohman (2013)	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Uji beda	Pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja
9	Wahyu Sapto Rini dan Geni Ruwanti (2016)	Analisis Anggaran dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	deskriptif	Menunjukkan bahwa perbandingan evaluasi selama tiga tahun anggaran yang ada menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi. Penyerapan anggaran yang tidak dapat secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti tidak terlaksananya kegiatan tingginya nilai pagu anggaran dan kurangnya koordinasi.
10	Nisrinah Laila Qadriyanti (2013)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial	Regresi linear berganda	Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial

11	Maarten de Jong and Iris van Beek (2012)	Introducing Accountable Budgeting : Lessons from a Decade of Performance-Based Budgeting in the Netherlands	Analisis berganda	<p>Yang pertama dari pelajaran ini adalah proses politik seperti alokasi anggaran oleh parlemen tidak akan dirasionalisasi dengan mengubah struktur anggaran. Kedua, mengakui bahwa anggaran program tidak dapat memenuhi harapan untuk menjadi kebijakan komprehensif yang berisi semua informasi yang dianggap berguna oleh setiap pemangku kepentingan. Ketiga, ada kebutuhan untuk informasi keuangan yang lebih rinci dalam dokumentasi anggaran, meskipun tidak ada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung pengambilan keputusan. Hasilnya, sekitar 50% dari semua indikator kinerja menghilang dari dokumen anggaran. Alasan pergeseran ini adalah kinerja informasi dalam anggaran lama lebih untuk melegitimasi pendanaan dan kepatuhan daripada dalam memberikan wawasan yang berguna untuk pengawasan. Menggunakan informasi kinerja untuk tujuan yang terakhir tidak selalu terjadi dalam siklus tahunan dan lebih mungkin terjadi setelah evaluasi. Jadi, pelajaran dari evaluasi memperoleh tempat yang lebih menonjol dalam dokumen anggaran .</p>
----	--	---	-------------------	---

12	Ruth Carlitz	Improving Transparency and Accountability in the Budget Process : An Assesment of Recent Initiatives	deskriptif	Menunjukkan bahwa terkait dengan anggaran TAI mulai membuahkan hasil. prosedur anggaran di seluruh dunia telah dibuka untuk partisipasi dan pengawasan yang lebih besar. Meski masih terbatas, ada juga bukti yang lebih besar keterbukaan dalam proses anggaran dapat berdampak pada pengeluaran dan pembangunan yang berpihak pada penduduk miskin. Penganggaran partisipatif dan audit sosial dapat memberikan hasil yang baik. Tidak hanya termasuk dalam pengalihan dana alokasi publik, tetapi juga memberikan akses yang lebih besar sanitasi publik, jalan beraspal, dan hibah tanah.
13	Ronnie Downes and Delphine Moretti (2017)	Budgeting and Performance in the European Union : A Review by the OECD in the Context of EU Budget Focused on Results	deskriptif	Sementara fokus dari Better Regulation telah menilai dampak dari legislasi dan inisiatif kebijakan, dan untuk mengurangi "pita merah" yang dirasakan, inisiatif tersebut pada umumnya tidak dianggap relevan untuk proses anggaran. Dalam hal ini, praktik di tingkat Uni Eropa tidak jauh berbeda dengan di banyak negara anggota OECD, di mana proses pengaturan (dengan fokus yang kuat pada penilaian dampak Regulasi atau RIA) dan proses manajemen pengeluaran (dengan fokus perbandingannya pada evaluasi) belum secara tradisional terintegrasi

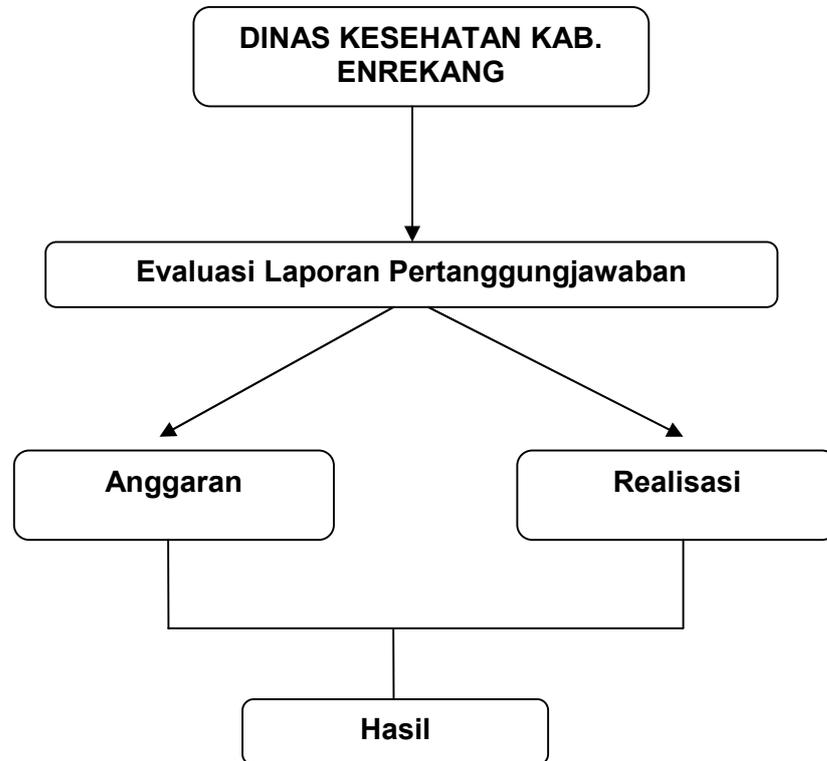
				dengan baik dalam pembuatan kebijakan secara keseluruhan.
14	Martin Webber and Samantha Treacy (2014)	The Effectiveness of Personal Budgets For People with Mental Health Problems : A Systematic Review	Deskriptif	Banyak evaluasi anggaran pribadi memiliki risiko bias yang tinggi, termasuk yang oleh organisasi yang dibebankan dengan pengiriman dukungan yang diarahkan sendiri di Inggris. Contoh kesehatan mental di dalam studi besar yang termasuk dalam ulasan ini cukup kecil, yang berdampak pada ukuran efek yang diperlukan untuk menunjukkan signifikansi statistik, atau membesarkan orang lain secara artifisial bias. Rekrutmen dalam studi ini menunjukkan bahwa beberapa peserta kurang 'kompleks', yang menyebabkan masalah ekstrapolasi lebih lanjut. Juga, periode follow-up terpanjang di salah satu studi adalah satu tahun yang, dengan kesulitan dalam pengaturan anggaran pribadi, menyebabkan banyak peserta tidak menerima anggaran mereka di tindak lanjut. Dalam beberapa

Sumber : Hasil matriks dari penelitian empiris, 2018

E. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas, untuk mencapai hasil yang optimal dalam perencanaan dan penganggaran yang baik maka perlu dilakukan suatu pengendalian yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diperoleh.

Disini yang menjadi objek penelitian adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, yang dimana yang seperti kita ketahui masih lemahnya kinerja terlihat dari pola penyerapan anggaran yang masih menumpuk diakhir tahun anggaran. Maka peneliti melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis selisih, membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan realisasinya. Maka dari itu peneliti menuangkan kedalam kerangka pikir penelitian seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

F. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam suatu penelitian, maka dari itu dengan melihat masalah diatas dirumuskan hipotesis : Diduga bahwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk angka dan dapat dihitung. Data kuantitatif yang dimaksud adalah berupa laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, mulai bulan April-Mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang di ungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dan lingkup objek penelitian. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Anggaran adalah suatu alat bantu perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu perusahaan. Pengukuran yang digunakan

dengan skala perbandingan yaitu membandingkan laporan keuangan tahun 2016 dan 2017.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi atau data angka serta dokumen dan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang pada periode tahun 2016 - 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode dokumen. Metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Data yang berasal dari laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2016-2017 yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai hasil dari evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Kemudian analisis selanjutnya adalah Analisis Selisih, model ini bertujuan untuk membandingkan antara realisasi dan anggaran pada suatu periode tertentu untuk mengetahui besar kecilnya selisih yang

terjadi. Dari model analisis ini dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab selisih tersebut. Analisis selisih ini menunjukkan :

- a. Data *absolut* atau jumlah dalam rupiah
- b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah
- c. Kenaikan atau penurunan dalam *prosentase*
- d. Sifat dari selisih yang terjadi (*favorable/unfavorable*)

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan catatan dokumen kegiatan, belum diketahui secara pasti kapan berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Namun diperkirakan berdiri sejak tahun 1975. Pada saat itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh dr.Gasper. Pada awal berdirinya keadaan sumber daya Dinas Kesehatan Enrekang masih sangat terbatas, baik dari segi anggaran yang tidak memadai, minimnya sarana, pelayanan kesehatan yang belum memadai termasuk teknologi kedokteran yang belum maju.

B. Visi & Misi Dinas Kesehatan Enrekang

a. Visi

Dari hasil musyawarah semua staf/petugas kesehatan Dinas Kesehatan dalam menetapkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah “Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Enrekang Maju Aman Sejahtera”

b. Misi

1. Memberdayakan Masyarakat Agar Mandiri Untuk Hidup Sehat
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata, Terjangkau dan Berkesinambungan
3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan

4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Lanjut Usia dan Gizi Masyarakat

C. Struktur Organisasi

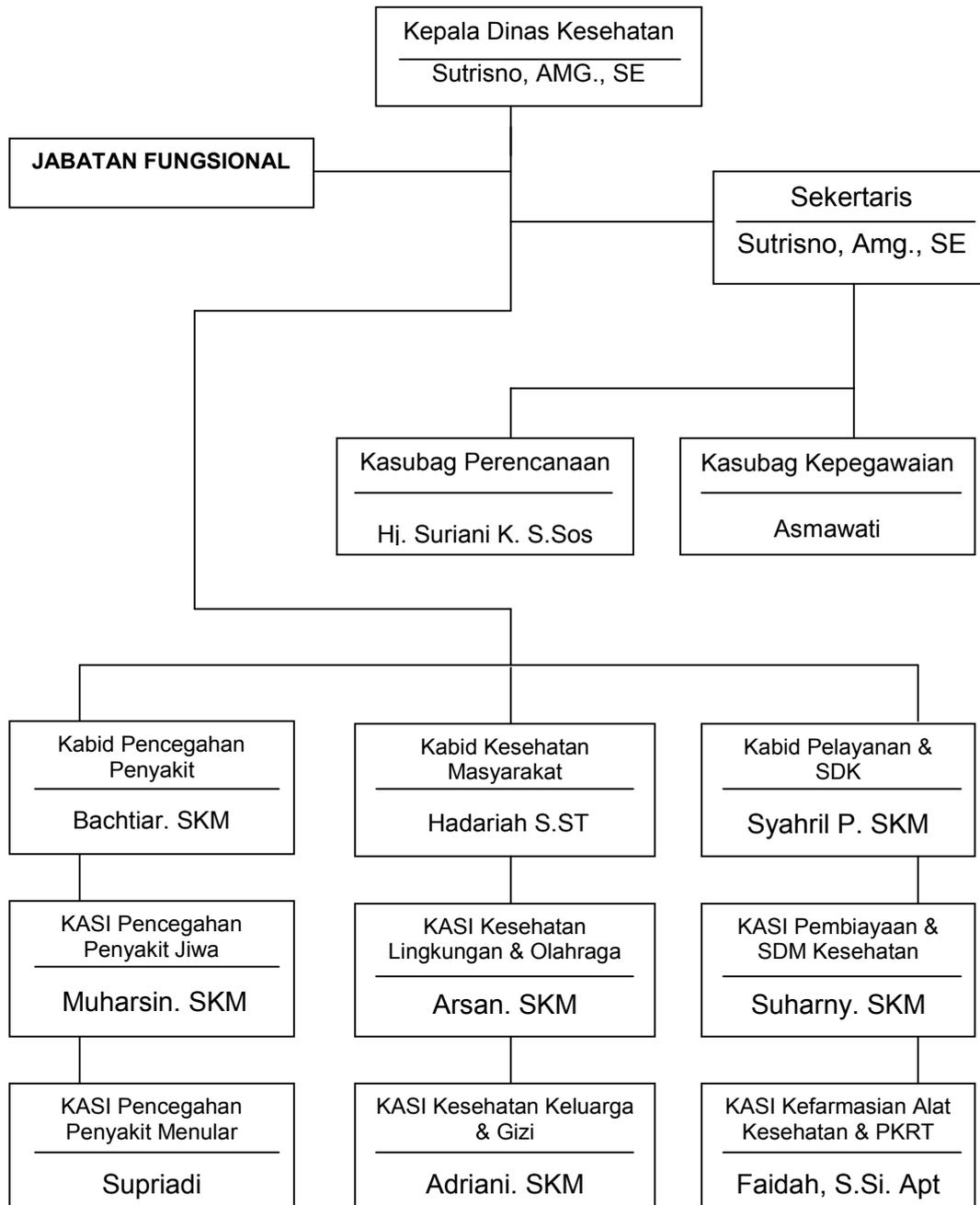
Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang merupakan wadah bagi penyelenggara tugas dan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, maka Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 5 (lima) Bagian atau Bidang dan 12 (dua belas) Seksi.

Bertolak dari jumlah dan jenis kewenangan aparat petugas kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan publik, maka dapat digambarkan sesuai bidang tugas dan fungsinya :

- a. Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian keuangan serta perencanaan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu :
 - i. Sub Bagian Perencanaan
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - iii. Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala – Kepala Seksi dilingkup Bidang Pelayanan Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu :
 - i. Seksi Yankes Dasar dan Rujukan
 - ii. Seksi Yankes Khusus

- iii. Seksi Yankes Farmasi, Makanan, Minuman dan Alkes
- c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala-Kepala Seksi dilingkup Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya dibantu :
- i. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra
 - ii. Seksi Penanggulangan Penyakit
 - iii. Seksi Penyehatan Lingkungan
- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga Gizi dan Usia Lanjut dalam pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu :
- i. Seksi Kesehatan Keluarga
 - ii. Seksi Gizi Masyarakat
 - iii. Seksi Kesehatan Usia Lanjut
- e. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala- Kepala Seksi dilingkup Bidang Promosi Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menerapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun seperangkat perundang-undangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan setiap satuan kerja pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Enrekang yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2017, alasan memberikan pendapat tersebut dikarenakan terdapat temuan mengenai permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sesuainya pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sesuai yang dilansir oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan bahwa hal-hal yang menjadi temuan BPK RI di Kabupaten Enrekang diantaranya mengenai piutang lainnya, aset, penyajian utang jangka pendek, penerimaan dan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini menggambarkan ada yang salah atau kurang efektif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2. Penyajian Data Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Enrekang

Program penyusunan anggaran pada instansi biasanya diikuti dengan laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan penggunaan anggaran beserta analisa dan evaluasi selama periode waktu yang akan datang seperti halnya anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang harus dilaporkan. Penggunaan anggaran menunjukkan analisa perbandingan antara yang tercantum dalam anggaran realisasi pelaksanaan dengan yang tercantum dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu analisis dan evaluasi sangat penting bagi penyusunan kebijakan selanjutnya untuk menghadapi periode-periode berikutnya.

Setelah diadakan penelitian mengenai fenomena permasalahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu adanya ketimpangan

antara anggaran dengan realisasinya, anggaran pada tahun 2016 – 2017 tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Berikut ini merupakan data laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2016 – 2017 :

Tabel 5.1 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang pada tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
TW I	63.148.920.220	1.415.697.352	2,24%
TW II	65.668.227.220	9.420.357.132	14,34%
TW III	65.668.227.220	20.417.643.177	32 %
TW IV	66.135.912.239	55.696.933.693	84,2%
Jumlah	260.621.286.899	86.950.631.354	34 %

Tabel 5.2 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
TW I	45.534.196.312	1.064.091.600	2,33 %
TW II	45.534.196.312	8.154.241.796	18 %
TW III	45.534.196.312	10.260.806.329	23%
TW IV	45.534.196.312	39.777.081.661	87,3 %
Jumlah	182.136.785.248	59.256.221.386	33 %

Hasil penelitian pada tahap akhir adalah melakukan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan pendekatan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang selama 2 tahun anggaran yang telah terjadi. Dimana dari kedua tahun anggaran yang dilakukan untuk pengukuran anggaran yang ada terhadap realisasi yang dilakukan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran tahun 2016

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2016 pada triwulan I menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 63.148.920.220 dengan realisasi Rp. 1.415.697.352 atau sebesar 2,24% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi 23%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24%; Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Skpd 67%. Pada triwulan II menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.668.227.220 dengan realisasi Rp. 9.420.357.132 atau sebesar 14,34% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi 48,5%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22,2 %; Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Skpd 67%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 50%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7% ; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12%. Pada triwulan III menunjukkan anggaran sebesar Rp. 65.668.227.220 dengan realisasi Rp. 20.417.643.177 atau sebesar 32% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi 67%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45,1%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,4%; Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Skpd 67%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 99,8%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,97%; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31,1%. Pada triwulan IV menunjukkan anggaran sebesar Rp. 66.135.912.239 dengan realisasi Rp. 55.696.933.693 atau sebesar 87,34% dengan rincian : Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi 97,73%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,29%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 99,71%; Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Skpd 100%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 99,86%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 86%; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 94,87%.

b. Realisasi Anggaran tahun 2017

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2017 pada triwulan I menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 1.064.091.600 atau sebesar 2,33 % dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi 18,3%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur 11,54%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 44,4%. Pada triwulan II menunjukan anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 8.154.241.796 atau sebesar 18% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41,8%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,14%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,5%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12,8%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10,6%; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19,8%. Pada Triwulan III menunjukkan anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 10.260.806.329 atau sebesar 23% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

72,5%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12,8%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 88,8%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27%; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 24%. Pada triwulan IV menunjukkan anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 39.777.081.661 atau sebesar 87,3% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,9%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 98,5%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 44,4%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 94%; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 99,9%.

B. Pembahasan

Anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami penurunan. Tahun anggaran 2016 anggaran belanja sebesar Rp. 260.621.286.899, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 182.136.785.248. Dengan besarnya jumlah anggaran pada dua tahun tersebut tidak diimbangi dengan naiknya realisasi. Adanya penyerapan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai alasan sehingga berpengaruh terhadap kualitas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap kegiatan sehingga menyebabkan kegiatan tidak terlaksana, tingginya nilai pagu

anggaran juga merupakan penyebab tidak terealisasinya anggaran secara maksimal, serta kurangnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan.

A. Program Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016

Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada triwulan I dan triwulan II, sub bagian pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 2.650.000.017 hanya terealisasi sebesar Rp. 642.000.000 dan Rp. 1.298.839.500 atau sebesar 24,2% dan 49% dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang dan jasa pada bagian pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap secara maksimal.

Pada sub bagian penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000, pada triwulan I hanya terealisasi sebesar Rp. 34.198.488 atau 18,9%, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 56.881.691 atau 31,6%, dan pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 85.776.738 atau 47,6% dikarenakan terlalu tinggi menaruh nilai pagu sehingga pelaksanaan realisasinya kurang maksimal. Realisasi untuk biaya air dan listrik hanya bisa dilakukan setelah pemakaian sehingga tidak bisa ditentukan seberapa besar anggaran yang dapat direalisasikan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada triwulan I, sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya koordinasi sehingga tidak dapat dilaksanakan. Pada triwulan II penyerapan dananya juga kurang dari 50% dimana hanya terealisasi sebesar Rp. 11.330.000 atau sebesar 28% ini dikarenakan besarnya pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional juga kurang maksimal penyerapannya dikarenakan kurangnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada pihak pelaksana kegiatan.

3. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp. 6.551.385.000, pada triwulan I hanya terealisasi sebesar Rp. 576.497.673 atau 8,7%, pada triwulan ke II terealisasi sebesar Rp. 2.045.311.824 atau 31,2% dan pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 2.722.426.692 atau sebesar 41,5 %. Ini dikarenakan tidak dilakukannya proses perencanaan pengadaan obat sebelum melaksanakan kegiatan sehingga dana yang disiapkan tidak direalisasikan secara maksimal.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 8.368.704.900, pada triwulan I tidak dapat terealisasi, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.002.132.000 atau 11,9% dan pada triwulan ketiga terealisasi sebesar Rp. 2.603.940.800 atau 31,11% ini dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga

realisasinya kurang maksimal dan metode promosi kesehatan yang diterapkan kurang efektif.

B. Program Dinas Kesehatan Tahun 2017

Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada triwulan I dan triwulan II, sub bagian pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 5.355.816.200 hanya terealisasi sebesar Rp. 980.350.000 dan Rp. 2.240.779.889 atau sebesar 18,3% dan 41,8% dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang dan jasa pada bagian pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap secara maksimal. Pada sub bagian penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp.262.600.000, pada triwulan I tidak adanya dana yang terealisasi pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 51.129.718 atau 19,4%, dikarenakan terlalu tinggi menaruh nilai pagu sehingga pelaksanaan realisasinya kurang maksimal. Realisasi untuk biaya air dan listrik hanya bisa dilakukan setelah pemakaian sehingga tidak bisa ditentukan seberapa besar anggaran yang dapat direalisasikan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada triwulan I, sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar

Rp. 150.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya koordinasi sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran ini dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Pada triwulan II dan triwulan III penyerapan dananya juga kurang dari 50% dimana hanya terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau sebesar 2% ini dikarenakan besarnya pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional juga kurang maksimal penyerapannya dikarenakan kurangnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada pihak pelaksana kegiatan.

Pada sub bagian pemeliharaan rutin berkala gedung kantor anggarannya sebesar Rp. 100.000.000, penyerapan dananya masing-masing pada triwulan I – triwulan III sebesar Rp. 41.616.000 atau sebesar 41,4%. Hal ini disebabkan besarnya pagu anggaran dan kurangnya petugas pelaksana kegiatan sehingga realisasinya tidak dapat secara maksimal dilaksanakan.

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.9.072.511.900, pada triwulan I tidak dapat terealisasi, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.800.184.440 atau 19,8% dan pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 2.195.348.464 atau 24,19% ini dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga realisasinya kurang maksimal dan metode promosi kesehatan yang diterapkan kurang efektif.

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 190.000.000, pada triwulan I tidak adanya realisasi anggaran, pada triwulan II dan triwulan ke III terealisasi sebesar Rp. 14.600.000 dan Rp.31.500.000 atau sebesar 7,6% dan 16,5%. Ini dikarenakan tingginya pagu anggaran, kurangnya koordinasi dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga realisasinya kurang maksimal.

C. Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, dimana pengukuran realisasi anggaran merupakan suatu penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga jika sebuah organisasi dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melaksanakan kegiatan dan realisasi kegiatannya akan menjadi evaluasi dan pembahasan dalam setiap hasil akhir yang harus dicapai oleh setiap SKPD terkait.

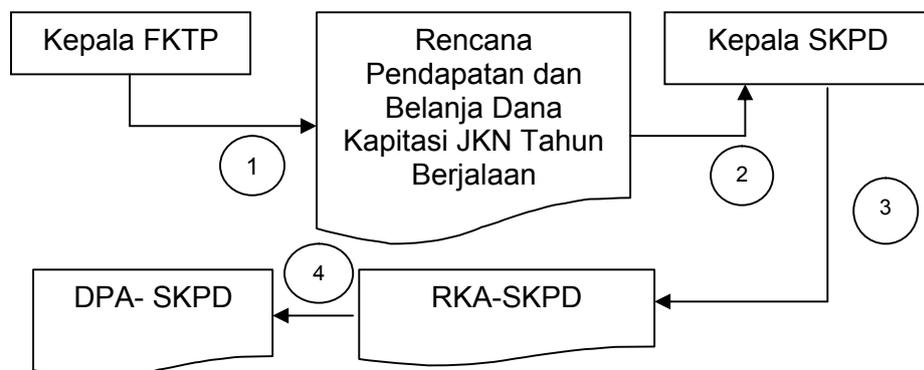
Masalah yang ada pada tahun anggaran 2016 dan 2017 tidak terlaksananya kegiatan, nilai pagu anggaran yang terlalu besar, perencanaan yang kurang matang menjadi faktor tidak terealisasinya anggaran secara maksimal. Pada beberapa program Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang seperti pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan anggaran selama dua tahun meningkat namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasinya. Penyerapan anggaran pada triwulan I sampai triwulan III cenderung rendah dan tidak merata. Rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun

anggaran akan memicu tingginya penyerapan diakhir tahun anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan realisasi anggaran di triwulan ke IV. Besarnya anggaran, kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis dengan pelaksana kegiatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian.

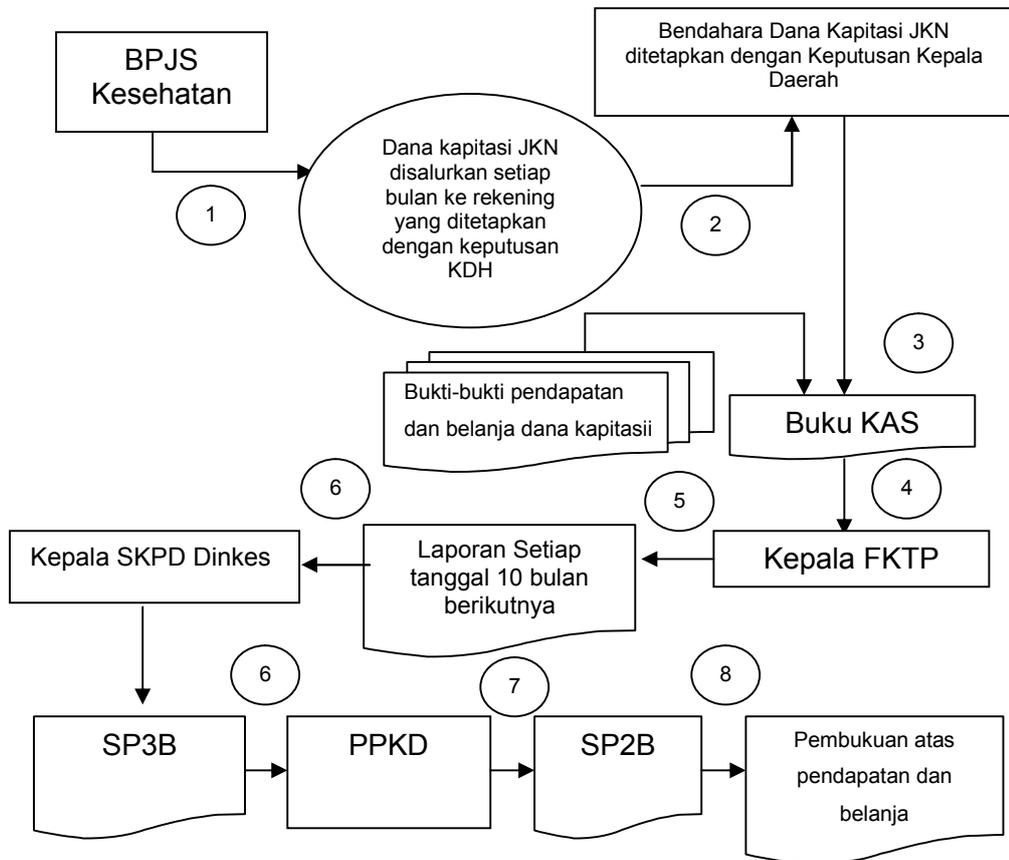
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Septo Rini dan Gemi Ruwanti (2016) dengan judul Analisis Anggaran Dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbandingan evaluasi selama tiga tahun anggaran yang ada menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi. Penyerapan anggaran yang tidak dapat secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti tidak terlaksananya kegiatan tingginya nilai pagu anggaran dan kurangnya koordinasi.

D. Flowchart laporan pertanggungjawaban FKTP Non-BLUD

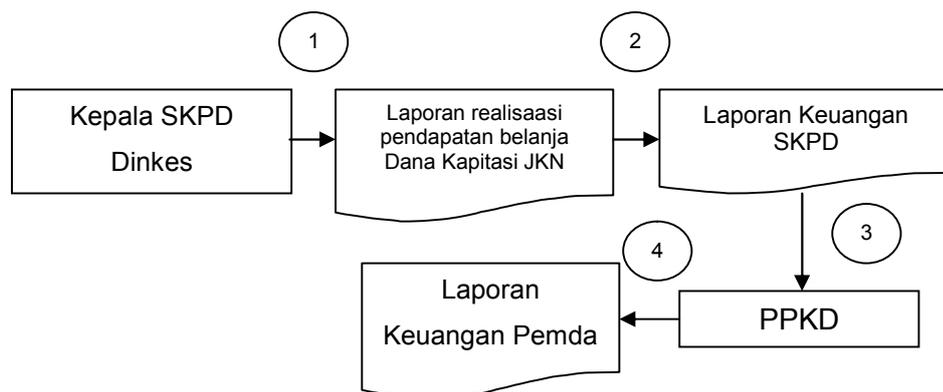
1. Penganggaran



2. Pelaksanaan dan penatausahaan



3. Pertanggungjawaban



Gambar 5.1

Flowchart pertanggungjawaban FKTP Non-BLUD

Penjelasan flowchart pertanggungjawaban pada gambar 5.1 :

1. Penganggaran

- a. Kepala FKTP membuat rencana pendapatan dan belanja JKN tahun berjalan
- b. Setelah selesai rencana pendapatan dan belanja JKN tersebut diserahkan kepada kepala SKPD
- c. Dari Kepala SKPD kemudian disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)
- d. Setelah itu dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- a. Berkas dari BPJS Kesehatan yaitu berupa dana kapitasi JKN disalurkan setiap bulan ke rekening yang ditetapkan dengan keputusan KDH
- b. Bendahara Dana Kapitasi JKN ditentukan oleh keputusan kepala daerah
- c. Dibuatkan buku kas, dari bukti-bukti pendapatan dan belanja dana kapitasi dan dilaporkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya
- d. Setelah itu dilaporkan ke Kepala FKTP
- e. Dari FKTP laporan tersebut dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya
- f. Setelah itu diserahkan ke Kepala SKPD Dinas Kesehatan
- g. Dari Kepala Dinkes dibuatkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

- h. Kemudian diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan dibuatkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)
- i. Dan dibuatkan pembukuan atas pendapatan dan belanja

3. Pertaanggungjawaban

- a. Dari Kepala SKPD Dinas Kesehatan, dibuat laporan realisasi pendapatan belanja Dana Kapitasi JKN
- b. Kemudian dibuatkan laporan keuangan untuk SKPD
- c. Lalu diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Dan dimasukkan ke laporan keuangan Pemda

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengukuran penilaian terhadap realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang seberapa besar tingkat kemajuan realisasi anggaran dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang ada selama dua tahun anggaran yang telah dilaksanakan namun dirasakan masih kurang mencapai hasil yang maksimal. Perbandingan evaluasi selama dua tahun realisasi anggaran yang ada menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi.
2. Hasil evaluasi yang tidak maksimal terjadi pada beberapa program Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang seperti pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan anggaran selama dua tahun meningkat namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasinya.
3. Rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran akan memicu tingginya penyerapan diakhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak dapat secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti tidak terlaksannya kegiatan,tingginya nilai pagu anggaran dan kurangnya koordinasi.
4. Hipotesis ditolak disebabkan dari pernyataan hipotesis anggaran sudah sesuai dengan realisasi tetapi setelah dilakukan penelitian masih banyak penyerapan anggaran yang kurang maksimal atau tidak mencapai target.

B. SARAN

1. Penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang akan datang agar lebih memperhatikan nilai realisasi anggaran yang dilakukan dan penganggaran yang tepat sehingga pelaksanaan realisasi dapat terlaksana secara maksimal.
2. Bagi pejabat pembuat anggaran agar dapat lebih teliti lagi pada saat menetapkan anggaran belanja terutama anggaran belanja barang dan jasa pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sehingga sisa anggaran tidak terlalu besar
3. Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih aktif dalam mengkoordinir kegiatannya sehingga tidak terjadi lagi kurangnya koordinasi kepada pelaksana kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernanto, C. Bastyo. 2015. Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada URKEU AKPOL Semarang). Jurnal Akuntansi. Vol. 3.No.1.
- Fahrianta, Y. Riswan. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.Jurnal Manajemen dan Akuntansi.Vol.13. No.1.
- Hidayat, W. Taufik., etc. 2015. Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4. No.11.
- Intihanah., etc. 2017. Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Vol.2. No.2.
- Irmajhe.2016. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, (Online),(<http://irmajhe.blogspot.co.id/2016/05/laporan-pertanggungjawaban-keuangan.html>), diakses 10 Januari 2018).
- Karompot, Riska., etc. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Jurnal EMBA. Vol.3. No.1.
- Latif, Abdul. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jurnal Akuntansi. Vol.2. No.4.
- Lomboan, M. Syurtika., dkk. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal EMBA. Vol.2. No.3.
- Muliyadi. 2013. Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Adminstrasi Reform.Vol.1. No.1.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Palillingan, F Anastasya., dkk. 2015. Analisis Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.3. No.1.
- Pamungkas, Bambang. 2013. Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.1. No.1.
- Parayanti, Eni. 2015. Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.3. No.3.

- Ruwanti, Gemi., etc. 2016. Analisis Anggaran dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal SPREAD. Vol.6. No.1.
- Suarsih, Santi., etc. 2017. Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. Jurnal EMBA. Vol.2. No.4.
- Suwandi, M. Mega., etc. 2017. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.6. No. 2.
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.3. No.1.
- Tulangow, P. Andre., etc. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA. Vol.4. No.3.
- Ulfi, 2016. Pengertian Anggaran, (Online) ,(<https://www.google.com/search?q=pengertian+anggaran++tahun+2015&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, diakses 26 Maret 2018).

LAMPIRAN

LAPORAN PERKEMBANGAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN / PEMBANGUNAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

KODE KEGIATAN BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)		REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PERSENTASE TERTERAPAN		Pencapaian Pencapaian	PPTK PELAKSANA	S U K A R T I	KBT
				FISIK	KEU	FISIK (%)	KEU (%)	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEU (%)				
81 01 10	Peningkatan Jasa Kesehatan, Sumber Daya dan Lingkungan	180.000.000	100	34.188.488	23,00	19,00	23,00	19,00			23,00	19,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	180.000.000	100	34.188.488	23,00	19,00	23,00	19,00			23,00	19,00			
81 01 10	Peningkatan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan	60.000.000	100	4.553.261	7,59	7,38	7,59	7,38			7,59	7,38	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	60.000.000	100	4.553.261	7,59	7,38	7,59	7,38			7,59	7,38			
81 01 10	Peningkatan Bahan Baku dan Perawatan Obat-obatan	2.300.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	2.300.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00			
81 01 10	Suplai obat Kesehatan dan Konsolidasi ke Luar Daerah	180.000.000	100	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	180.000.000	100	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
81 01 10	Pelaksanaan Pelayanan/Pengobatan Barang dan Jasa	15.000.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	15.000.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00			
81 01 10	Konsolidasi, Koordinasi Dalam Daerah & Perencanaan	140.000.000	100	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	140.000.000	100	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
81 01 20	Peningkatan Administrasi Keuangan & Perencanaan	2.688.017.000	100	642.000.000	23,86	24,23	23,86	24,23			23,86	24,23	Drs Ruslan S		
5 1 2	Barang & Jasa	2.688.017.000	100	642.000.000	23,86	24,23	23,86	24,23			23,86	24,23			
81 01 20	Pengembangan Kesehatan Dinas/Operasional	3.967.122.888	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	3.967.122.888	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00			
81 01 20	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	30.000.000	100	15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	30.000.000	100	15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
81 01 20	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas/Operasional	40.000.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00	Drs Ruslan S		
5 2 2	Barang & Jasa	40.000.000	100	-	-	-	-	-			0,00	0,00			

Format Laporan Triwulan Realisasi Fisik & Keuangan

NO	KODE KEGIATAN BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)		REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)	
					FISIK	KEU	FISIK (%)	KEU (%)	NARASI	SATUAN (UNIT)
81	01 32 10	Peningkatan Pelayanan Pर्सantuan Melalui Jampersal (DAK Non Fisik-Jampersal)	1.663.542.420	100	-	-	30,00	-		
	5 2 1	Belanja Pegawai	26.950.000	1 62	-	-	-	-		
	5 2 2	Barang & Jasa	1.636.592.420	98 38	-	-	30,00	-		
82	01 33 01	Penyusunan Profil Kesehatan, Pemutakhiran Data dan Laporan Tahunan Kesehatan	46.000.000	100	-	-	80,00	-		
	5 2 2	Barang & Jasa	46.000.000	100	-	-	80,00	-		
83	01 33 03	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	20.000.000	100	-	-	25,00	-		
	5 2 2	Barang & Jasa	20.000.000	100	-	-	25,00	-		
84	01 33 04	Pengembangan Sistem informasi Kesehatan (SIK)	72.920.400	100	-	-	-	-		
	5 2 2	Barang & Jasa	72.920.400	100	-	-	-	-		
85	01 33 05	Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Program/Kegiatan	20.000.000	100	-	-	100,00	-		
	5 2 2	Barang & Jasa	20.000.000	100	-	-	100,00	-		
JUMLAH			63,148,920,220	100	1,415,697,352	17	4			

LAPORAN PERKEMBANGAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN II
PELAKSANAAN KEGIATAN / PEMBANGUNAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

NO	KODE KEGIATAN / BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG		Permasalahan	Pencapaian Permasalahan
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEU (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000	100	58,881,891	50.00	31.60			50.00	31.60		
		Barang & Jasa	180,000,000	100.00	58,881,891	50.00	31.60			50.00	31.60		
2	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	100	28,129,839	50.00	42.56			50.00	42.56		
		Barang & Jasa	60,000,000	100.00	28,129,839	50.00	42.56			50.00	42.56		
3	01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	7,500,000	100	2,595,900	40.00	34.60			40.00	34.60		
		Barang & Jasa	7,500,000	100.00	2,595,900	40.00	34.60			40.00	34.60		
4	01 01 18	Rapat/rapat Koordinasi dan Konsolidasi ke Luar Daerah	180,000,000	100	103,917,100	70.00	57.73			70.00	57.73		
		Barang & Jasa	180,000,000	100.00	103,917,100	70.00	57.73			70.00	57.73		
5	01 01 19	Pelaksanaan Pelatihan/Pengadaan Barang dan Jasa	15,000,000	100	-	60.00	-			60.00	-		
		Barang & Jasa	15,000,000	100.00	-	60.00	-			60.00	-		
6	01 01 20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	140,800,000	100	80,777,000	60.00	57.45			60.00	57.45		
		Barang & Jasa	140,800,000	100.00	80,777,000	60.00	57.45			60.00	57.45		
7	01 01 21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	2,650,017,000	100	1,298,839,500	50.00	49.01			50.00	49.01		
		Barang & Jasa	2,650,017,000	100.00	1,298,839,500	50.00	49.01			50.00	49.01		
8	01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3,967,122,500	100	-	80.00	-			80.00	-		
		Barang & Jasa	3,967,122,500	100.00	-	80.00	-			80.00	-		
9	01 03 12	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Sepeda Motor	1,180,000,000	29.74	-	80.00	-			23.80	0.00		
		Barang & Jasa	1,180,000,000	29.74	-	80.00	-			23.80	0.00		
10	01 03 15	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Roda Empat	2,787,122,500	70.26	-	80.00	-			56.20	0.00		
		Barang & Jasa	2,787,122,500	70.26	-	80.00	-			56.20	0.00		
11	01 03 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38,000,000	100	4,733,000	50.00	15.78			50.00	15.78		
		Barang & Jasa	38,000,000	100.00	4,733,000	50.00	15.78			50.00	15.78		
12	01 03 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	40,000,000	100	11,330,000	50.00	28.33			50.00	28.33		
		Barang & Jasa	40,000,000	100.00	11,330,000	50.00	28.33			50.00	28.33		

laporan realisasi fisik&keuangan 2016

NO	KODE KEGIATAN / BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG		Permasalahan	Pencapaian Permasalahan
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEU (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	01 03 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50,000,000	100	8,125,000	50.00	12.25			50.00	12.25		
		Barang & Jasa	50,000,000	100.00	8,125,000	50.00	12.25			50.00	12.25		
14	01 03 06	Pemilihan Angka kredit Tenaga Fungsional	20,000,000	100	-	50.00	-			50.00	-		
		Barang & Jasa	20,000,000	100.00	-	50.00	-			50.00	-		
15	01 03 11	Belanja Pegawai	9,305,000	48.53	-	50.00	-			23.26	0.00		
		Barang & Jasa	9,305,000	48.53	-	50.00	-			23.26	0.00		
16	01 05 04	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS	70,000,000	100	41,189,000	50.00	58.84			50.00	58.84		
		Barang & Jasa	70,000,000	100.00	41,189,000	50.00	58.84			50.00	58.84		
17	01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	100	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
		Barang & Jasa	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
18	01 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun	2,000,000	100	-	50.00	-			50.00	-		
		Barang & Jasa	2,000,000	100.00	-	50.00	-			50.00	-		
19	01 06 05	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	5,000,000	100	-	50.00	-			50.00	-		
		Barang & Jasa	5,000,000	100.00	-	50.00	-			50.00	-		
20	01 09 01	Penyusunan RKA SKPD	2,000,000	100	-	-	-			-	-		
		Barang & Jasa	2,000,000	100.00	-	-	-			-	-		
21	01 09 02	Penyusunan DPA SKPD	2,000,000	100	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
		Barang & Jasa	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
22	01 09 03	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,000,000	100	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
		Barang & Jasa	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
23	01 15 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,551,385,000	100	2,045,311,824	50.00	31.22			50.00	31.22		
		Barang & Jasa	6,551,385,000	100.00	2,045,311,824	50.00	31.22			50.00	31.22		
24	01 15 06	Monev Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan	15,000,000	100	-	50.00	-			50.00	-		
		Barang & Jasa	15,000,000	100.00	-	50.00	-			50.00	-		
25	01 15 08	Perencanaan Kebutuhan Obat	15,000,000	100	15,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
		Barang & Jasa	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	100.00			100.00	100.00		
26	01 18 15	Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	5,471,964,000	100	-	-	-			-	-		
		Barang & Jasa	5,471,964,000	100.00	-	-	-			-	-		

NO	KODE KEGI/ BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		F
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	01 32 19	Peningkatan Pelayanan Persatisian Melalui Jampersat (DAK Non Fisik-Jampersat)	1,463,542,420	100	358,386,631	50.00	18.73			
	5 2 1	Belanja Pegawai	198,000,000	11.50	83,850,000	50.00	42.35			
	5 2 2	Barang & Jasa	1,465,542,420	88.10	274,536,631	50.00	18.73			
83	01 33 01	Penyusunan Profil Kesehatan, Pemutakhiran Data dan Laporan Tahunan Kesehatan	46,000,000	100	31,590,000	80.00	68.67			
	5 2 2	Barang & Jasa	46,000,000	100.00	31,590,000	80.00	68.67			
84	01 33 03	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	20,000,000	100	-	50.00	-			
	5 2 2	Barang & Jasa	20,000,000	100.00	-	50.00	-			
85	01 33 04	Pengembangan Sistem informasi Kesehatan (SIK)	72,920,400	100	-	50.00	-			
	5 2 2	Barang & Jasa	72,920,400	100.00	-	50.00	-			
86	01 33 05	Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Program/Kegiatan	20,000,000	100	19,814,000	100.00	99.07			
	5 2 2	Barang & Jasa	20,000,000	100.00	19,814,000	100.00	99.07			
JUMLAH			65,668,227,220	100	9,420,357,132	58	39			

LAPORAN PERKEMBANGAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN III
PELAKSANAAN KEGIATAN / PEMBANGUNAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

NO	KODE KEGI/ BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTYMBANG		Pemasukan
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEU (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000	0.27	85,776,738	75.00	47.65			0.21	0.43	
	5 2 2	Barang & Jasa	180,000,000	0.27	85,776,738	75.00	47.65			0.21	0.43	
2	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40,000,000	0.09	45,349,225	75.00	67.85			0.07	0.06	
	5 2 2	Barang & Jasa	40,000,000	0.09	40,709,225	75.00	67.85			0.07	0.06	
3	01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	7,500,000	0.01	4,640,000	60.00	61.87			0.01	0.01	
	5 2 2	Barang & Jasa	7,500,000	0.01	4,640,000	60.00	61.87			0.01	0.01	
4	01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi ke Luar Daerah	180,000,000	0.27	176,918,700	98.00	97.79			0.27	0.27	
	5 2 2	Barang & Jasa	180,000,000	0.27	176,918,700	98.00	97.79			0.27	0.27	
5	01 01 19	Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa	15,000,000	0.02	-	60.00	-			0.01	0.00	
	5 2 1	Belanja Pegawai	5,400,000	0.01	-	100.00	-			0.01	0.00	
	5 2 2	Barang & Jasa	9,600,000	0.01	-	60.00	-			0.01	0.00	
6	01 01 20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	140,600,000	0.21	123,350,000	90.00	87.73			0.19	0.18	
	5 2 2	Barang & Jasa	140,600,000	0.21	123,350,000	90.00	87.73			0.19	0.18	
7	01 01 21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	2,650,017,000	4.04	2,951,439,500	75.00	88.32			3.03	2.73	
	5 2 2	Barang & Jasa	2,650,017,000	4.04	1,786,629,500	75.00	67.42			3.03	2.72	
8	01 02 06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3,987,122,500	6.04	1,164,800,000	60.00	20.90			2.88	1.77	
	5 03 12	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Sepeda Motor	1,180,000,000	1.80	-	-	-			-	-	
	5 03 15	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Roda Empat	2,787,122,500	4.24	1,164,800,000	60.00	41.79			2.88	1.77	
9	01 02 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30,000,000	0.05	4,733,000	80.00	15.78			0.04	0.01	
	5 2 2	Barang & Jasa	30,000,000	0.05	4,733,000	80.00	15.78			0.04	0.01	

NO	KODE KEU BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)	PERSENJABE TERTERIMA		
						FISIK	KEU		NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)
10	01 03 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	40,000,000	0.06	36,061,650	100.00	90.15			0.06	0.06
	5 2 2	Barang & Jasa	40,000,000	0.06	36,061,650	100.00	90.15			0.06	0.06
13	01 02 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50,000,000	0.08	13,375,000	50.00	26.75			0.04	0.04
	5 2 2	Barang & Jasa	50,000,000	0.08	13,375,000	50.00	26.75			0.04	0.04
12	01 03 06	Pemilaian Angka kredit Tenaga Fungsional	20,000,000	0.03	9,995,630	75.00	49.98			0.02	0.02
	5 2 1	Belanja Pegawai	9,305,000	0.01	4,652,500	50.00	50.00			0.01	0.01
	5 2 2	Barang & Jasa	10,695,000	0.02	5,343,130	75.00	49.96			0.01	0.01
13	01 05 04	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS	70,000,000	0.11	48,566,500	80.00	69.38			0.09	0.07
	5 2 2	Barang & Jasa	70,000,000	0.11	48,566,500	80.00	69.38			0.09	0.07
14	01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
	5 2 2	Barang & Jasa	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
15	01 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun	2,000,000	0.003	2,000,000	75.00	100.00			0.00	0.00
	5 2 2	Barang & Jasa	2,000,000	0.003	2,000,000	75.00	100.00			0.00	0.00
16	01 06 05	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	5,000,000	0.008	-	75.00	-			0.01	-
	5 2 2	Barang & Jasa	5,000,000	0.008	-	75.00	-			0.01	0.00
17	01 09 01	Penyusunan RKA SKPD	2,000,000	0.003	-	30.00	-			0.00	-
	5 2 2	Barang & Jasa	2,000,000	0.003	-	30.00	-			0.00	0.00
18	01 09 02	Penyusunan DPA SKPD	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
	5 2 2	Barang & Jasa	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
19	01 09 06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
	5 2 2	Barang & Jasa	2,000,000	0.003	2,000,000	100.00	100.00			0.00	0.00
20	01 15 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,551,385,000	9.976	2,722,426,692	75.00	41.55			7.48	4.15
	5 2 2	Barang & Jasa	6,551,385,000	9.976	2,722,426,692	75.00	41.55			7.48	4.15
21	01 15 06	Movev Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan	15,000,000	0.023	14,960,000	100.00	99.73			0.02	0.02
	5 2 2	Barang & Jasa	15,000,000	0.023	14,960,000	100.00	99.73			0.02	0.02
22	01 15 08	Perencanaan Kebutuhan Obat	15,000,000	0.023	15,000,000	100.00	100.00			0.02	0.02
	5 2 2	Barang & Jasa	15,000,000	0.023	15,000,000	100.00	100.00			0.02	0.02
23	01 16 16	Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	5,471,964,000	8.33	-	-	-			-	-
	5 2 2	Barang & Jasa	5,471,964,000	8.33	-	-	-			-	-

NO	KODE KEU BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)	PERSENJABE TERTERIMA		Persentase
						FISIK	KEU		NARASI	SATUAN (UNIT)	
81	01 32 14	Pemantauan dan Pengawasan Ibu Hamil dan Bayi Resto	22,626,000	0.034	22,526,000	100.00	100.00			0.03	0.03
	5 2 1	Belanja Pegawai	2,640,000	0.004	2,640,000	100.00	100.00			0.00	0.00
	5 2 2	Barang & Jasa	19,986,000	0.030	19,886,000	100.00	100.00			0.03	0.03
82	01 33 18	Peningkatan Pelayanan Persalinan Melalui Jampersat (DAK Non Fisik-Jampersat)	1,863,542,420	2.53	365,380,531	75.00	30.78			1.90	0.78
	5 2 1	Belanja Pegawai	198,000,000	0.30	83,850,000	42.00	42.35			0.13	0.13
	5 2 2	Barang & Jasa	1,465,542,420	2.23	281,530,531	75.00	19.21			1.87	0.43
83	01 33 01	Penyusunan Profil Kesehatan, Pemutakhiran Data dan Laporan Tahunan Kesehatan	46,000,000	0.07	41,500,000	100.00	90.22			0.07	0.06
	5 2 2	Barang & Jasa	46,000,000	0.07	41,500,000	100.00	90.22			0.07	0.06
84	01 33 03	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	20,000,000	0.03	9,752,500	75.00	48.76			0.02	0.01
	5 2 2	Barang & Jasa	20,000,000	0.03	9,752,500	75.00	48.76			0.02	0.01
85	01 33 04	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	72,920,400	0.11	14,501,200	100.00	19.89			0.11	0.02
	5 2 2	Barang & Jasa	72,920,400	0.11	14,501,200	100.00	19.89			0.11	0.02
86	01 33 05	Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Program/Kegiatan	20,000,000	0.03	19,814,000	100.00	99.07			0.03	0.03
	5 2 2	Barang & Jasa	20,000,000	0.03	19,814,000	100.00	99.07			0.03	0.03
JUMLAH			65,668,227,220	100	20,417,643,177	77	55			77	55

LAPORAN PERKEMBANGAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN TRIMULAN IV
 PELAKSANAAN KEGIATAN / PEMBANGUNAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

NO	KODE KEGI/ BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENT TERTAMBAH
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	
1	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155,000,000	0.23	141,473,024	100.00	91.27			0.23
	5 2 2	Barang & Jasa	155,000,000	0.23	141,473,024	100.00	91.27			0.23
2	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	85,000,000	0.13	80,612,855	100.00	94.84			0.13
	5 2 2	Barang & Jasa	85,000,000	0.13	80,612,855	100.00	94.84			0.13
3	01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	10,000,000	0.02	9,580,000	100.00	95.80			0.02
	5 2 2	Barang & Jasa	10,000,000	0.02	9,580,000	100.00	95.80			0.02
4	01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi ke Luar Daerah	285,000,000	0.43	284,933,200	100.00	99.98			0.43
	5 2 2	Barang & Jasa	285,000,000	0.43	284,933,200	100.00	99.98			0.43
5	01 01 19	Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa	15,000,000	0.02	15,000,000	100.00	100.00			0.02
	5 2 1	Belanja Pegawai	5,400,000	0.01	5,400,000	100.00	100.00			0.01
	5 2 2	Barang & Jasa	9,600,000	0.01	9,600,000	100.00	100.00			0.01
6	01 01 20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	282,290,000	0.43	280,910,000	100.00	99.51			0.43
	5 2 2	Barang & Jasa	282,290,000	0.43	280,910,000	100.00	99.51			0.43
7	01 01 21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	2,928,166,400	4.43	2,862,662,300	100.00	97.76			4.43
	5 2 2	Barang & Jasa	2,928,166,400	4.43	2,862,662,300	100.00	97.76			4.43
8	01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3,972,214,000	6.01	3,323,683,000	93.00	83.67			5.98
	5 03 12	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Sepeda Motor	1,300,518,000	1.97	1,243,869,000	95.00	95.64			1.97
	5 03 15	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Roda Empat	2,671,696,000	4.04	2,079,814,000	90.00	77.85			3.99
9	01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30,000,000	0.05	25,007,000	100.00	83.36			0.05
	5 2 2	Barang & Jasa	30,000,000	0.05	25,007,000	100.00	83.36			0.05

NO	KODE KEGI/ BELANJA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA/DPA KONTRAK (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENT TERTAMBAH
						FISIK	KEU	NARASI	SATUAN (UNIT)	
83	01 32 14	Pemantauan dan Pengawasan Ibu Hamil dan Bayi Resti	22,526,000	0.034	22,526,000	100.00	100.00			
	5 2 1	Belanja Pegawai	2,640,000	0.004	2,640,000	100.00	100.00			
	5 2 2	Barang & Jasa	19,886,000	0.030	19,886,000	100.00	100.00			
84	01 32 19	Peningkatan Pelayanan Persalinan Melalui Jampersal (DAK Non Fisik-Jampersal)	717,700,000	1.09	524,264,763	100.00	73.05			
	5 2 1	Belanja Pegawai	100,650,000	0.15	97,650,000	100.00	97.02			
	5 2 2	Barang & Jasa	617,050,000	0.93	426,614,763	100.00	69.14			
85	01 33 01	Penyusunan Profil Kesehatan, Pemutakhiran Data dan Laporan Tahunan Kesehatan	46,000,000	0.07	45,657,000	100.00	99.25			
	5 2 2	Barang & Jasa	46,000,000	0.07	45,657,000	100.00	99.25			
86	01 33 03	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	53,000,000	0.08	53,000,000	100.00	100.00			
	5 2 2	Barang & Jasa	53,000,000	0.08	53,000,000	100.00	100.00			
87	01 33 04	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	72,920,400	0.11	72,817,100	100.00	99.86			
	5 2 2	Barang & Jasa	72,920,400	0.11	72,817,100	100.00	99.86			
88	01 33 05	Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Program/Kegiatan	19,814,000	0.03	19,814,000	100.00	100.00			
	5 2 2	Barang & Jasa	19,814,000	0.03	19,814,000	100.00	100.00			
JUMLAH			66,135,912,239	100	55,696,933,693	98	84			

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KEADAAN BULAN JANUARI - MARET
SUMBER DANA APBD

NO	KODE	SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA /DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN(RP)	REALISASI (%)	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG (%)	PPTR/PELAKSANA/RET.
							NARASI	SATUAN (UNIT)		
	1.01.02.01.00	Dinas Kesehatan								
	1.01.02.1.01.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,355,816,200							
1.1	1.01.02.1.01.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	262,600,000	0.58			Terbayarnya Biaya Telpon, Air Dan Listrik	1 Bulan		
		-Barang Dan Jasa	262,600,000	0.58						
1.2	1.01.02.1.01.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	142,000,000	0.31			Tersedianya Blmpap Dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas/operasional	1 Bulan		
		-Barang Dan Jasa	142,000,000	0.31						
1.3	1.01.02.1.01.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	0.02			Adanya Bahan Bacaan Dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Bulan		
		-Barang Dan Jasa	10,000,000	0.02						
1.4	1.01.02.1.01.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	394,950,000	0.87			Adanya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Paket		
		-Barang Dan Jasa	394,950,000	0.87						
1.5	1.01.02.1.01.02.01.00.01.19	Pelaksanaan Pelelangan/pengadaan Barang & jasa	15,000,000	0.03			Terlaksananya Paket Pekerjaan Di Dinas Kesehatan	1 Paket		
		-Pegawai	7,500,000	0.02						
		-Barang Dan Jasa	7,500,000	0.02						
1.6	1.01.02.1.01.02.01.00.01.20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	312,600,000	0.69			Adanya Koordinasi/peninjauan Lapangan	1 Paket		
		-Barang Dan Jasa	312,600,000	0.69						
1.7	1.01.02.1.01.02.01.00.01.21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	4,218,666,200	9.26	980,350,000	24	23.24	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	0.02 2.15
		-Barang Dan Jasa	4,218,666,200	9.26						
	1.01.02.1.01.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	168,500,000							
2.1	1.01.02.1.01.02.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100,000,000	0.22			Terpebiharnya Gedung Kantor	1 Unit	0.03 0.99	Sasaran, Ang, Se
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	41,616,000	42	41.62			

2.2	1.01.02.1.01.02.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	150,000,000	0.33			Tertaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	1 Unit		
		-Barang Dan Jasa	150,000,000	0.33						
2.3	1.01.02.1.01.02.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	118,500,000	0.26			Terpebiharnya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit		
		-Barang Dan Jasa	118,500,000	0.26		920,000	10	0.78		
3	1.01.02.1.01.02.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40,000,000						0.01 8	Sasaran
3.1	1.01.02.1.01.02.01.00.03.06	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	40,000,000	0.09			Tertaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Kesehatan (Medis & Paramedis)	1 Paket		
		-Pegawai	20,300,000	0.04						
		-Barang Dan Jasa	19,700,000	0.04						
4	1.01.02.1.01.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000							
4.1	1.01.02.1.01.02.01.00.05.04	Diklat Tehnis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns	100,000,000	0.22			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tehnis	1 Paket		
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22						
5	1.01.02.1.01.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	21,000,000							
5.1	1.01.02.1.01.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Rikhtsar Realisasi Kinerja Skpd	3,000,000	0.01			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Skpd	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01						
5.2	1.01.02.1.01.02.01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran Dan Akhir Tahun	15,000,000	0.03			Tersusunnya Pelaporan Keuangan	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	15,000,000	0.03						
5.3	1.01.02.1.01.02.01.00.06.05	Penyusunan Laporan Realisasi Fiskal Dan Keuangan	3,000,000	0.01			Tersusunnya Laporan Realisasi Fiskal Dan Keuangan	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01						
6	1.01.02.1.01.02.01.00.09	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Skpd	24,000,000							
6.1	1.01.02.1.01.02.01.00.09.01	Penyusunan Rka Skpd	3,000,000	0.01			Tersusunnya Rka Skpd	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01						
6.2	1.01.02.1.01.02.01.00.09.02	Penyusunan Dpa Skpd	8,000,000	0.02			Tersusunnya Dpa Skpd	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	8,000,000	0.02						
6.3	1.01.02.1.01.02.01.00.09.03	Penyusunan Renstra Skpd	10,000,000	0.02			Adanya Renstra Skpd	1 Dokumen		
		-Barang Dan Jasa	10,000,000	0.02						

20.4	1.01.02.1.01.02.01.00.33.05	Koordinasi Dan Konsolidasi Perencanaan Program/kegiatan Barang Dan Jasa	25,000,000	0.05				Tersedianya Bahan Utasasi Rencana Program/kegiatan	1 Paket			
			25,000,000	0.05								
		JUMLAH	43,534,196,312	100	1,064,091,600	2.56	2.34					

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KEADAAN BULAN APRIL - JUNI SUMBER DANA APBD

NO	KODE	SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA /DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN(RP)	REALISASI (%)		INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG		PPTR/PELAKSANA, KET.
						FISIK	KEUANGAN	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK/KEUANGAN (%)	FISIK/KEUANGAN (%)	
	1.01.02.01.00	Dinas Kesehatan										
	1.01.02.1.01.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,355,816,200									
1.1	1.01.02.1.01.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	262,600,000	0.58				Terbayarnya Biaya Telpon, Air Dan Listrik	1 Bulan			
		Barang Dan Jasa	262,600,000	0.58	51,129,718	19	19.47			0.31	0.11	
1.2	1.01.02.1.01.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	142,000,000	0.31				Tersedianya Ebn/jas Dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas/operasional	1 Bulan			
		Barang Dan Jasa	142,000,000	0.31	49,125,911	34	34.6			0.36	0.11	
1.3	1.01.02.1.01.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	0.02				Adanya Bahan Bacaan Dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Bulan			
		Barang Dan Jasa	10,000,000	0.02								
1.4	1.01.02.1.01.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	394,950,000	0.87				Adanya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Paket			
		Barang Dan Jasa	394,950,000	0.87	70,046,260	18	17.74			0.09	0.15	
1.5	1.01.02.1.01.02.01.00.01.19	Pelaksanaan Pelelangan/pengadaan Barang & Jasa	15,000,000	0.03				Terlelangnya Paket Pekerjaan Di Dinas Kesehatan	1 Paket			
		Pegawai	7,500,000	0.02	1,550,000	21	20.67			0.11	0	
		Barang Dan Jasa	7,500,000	0.02								
1.6	1.01.02.1.01.02.01.00.01.20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	312,600,000	0.69				Adanya Koordinasi/peninjauan Lapangan	1 Paket			
		Barang Dan Jasa	312,600,000	0.69	52,990,000	16	16.95			0.06	0.12	
1.7	1.01.02.1.01.02.01.00.01.21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	4,218,666,200	9.26				Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			
		Barang Dan Jasa	4,218,666,200	9.26	2,015,938,000	49	47.79			0.04	4.43	Sutrisno, Amg, Se
	1.01.02.1.01.02.01.00.01.22	Perogram Penlokatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	168,500,000					Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit			
2.1	1.01.02.1.01.02.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100,000,000	0.22						0.03	0.09	Sutrisno, Amg, Se
		Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	41,616,000	42	41.62					Holoma

2.2	1.01.02.1.01.02.01.00.02.34	Pembelian Rutin / Berkala Kendaraan Dingin / Operasional	150,000,000	0.33					Terdilaksananya Pembelian Kendaraan Nonoperasional	1	Dok			
		Barang Dan Jasa	150,000,000	0.33	30,000,000	45	20					0.03	0.07	
2.3	1.01.02.1.01.02.01.00.02.35	Pembelian Rutin / Berkala Perawatan Gedung Kantor	118,500,000	0.26					Terdilaksananya Perawatan Gedung Kantor	1	Dok			
		Barang Dan Jasa	118,500,000	0.26	24,730,000	31	20.87					0.02	0.05	Sutrisna, Adig, Sa
		Program Peningkatan Kualitas Asuransi	40,000,000											
2.4	1.01.02.1.01.02.01.00.03.06	Pendapatan Angka Kredit Tenaga Pungional	40,000,000	0.09					Terdilaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Pungional Kesehatan (Medis & Paramedis)	1	Paket			
		Pegawai	20,300,000	0.04	4,310,000	21	21.23					0.02	0.01	
		Barang Dan Jasa	19,700,000	0.04	5,947,000	28	25.62					0.03	0.01	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000											
2.5	1.01.02.1.01.02.01.00.05.04	Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns	100,000,000	0.22					Isi diklat Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	1	Paket			
		Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	72,535,000	73	72.54					0.05	0.16	
		Program Peningkatan Kemampuan Berbasis Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Dan Ketahanan	21,000,000											
2.6	1.01.02.1.01.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Akhlar Realisasi Kinerja Skpd	3,000,000	0.01					Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Skpd	1	Dokumen			
		Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	2,694,100	100	89.8					0.07	0.01	
2.7	1.01.02.1.01.02.01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulun, Triwulan, Semesteran Dan Akhir Tahun	15,000,000	0.03					Tersusunnya Pelaporan Keuangan	1	Dokumen			
		Barang Dan Jasa	15,000,000	0.03										
2.8	1.01.02.1.01.02.01.00.06.03	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	3,000,000	0.01					Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	1	Dokumen			
		Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01										
		Program Koordinasi Dan Konsolidasi Perencanaan Program/kegiatan	25,000,000											
		Barang Dan Jasa	25,000,000	0.05										
2.9	1.01.02.1.01.02.01.00.09.01	Penyusunan Rka Skpd	3,000,000	0.01					Tersusunnya Rka Skpd	1	Dokumen			
		Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01										
2.10	1.01.02.1.01.02.01.00.09.02	Penyusunan Dpa Skpd	8,000,000	0.02					Tersusunnya Dpa Skpd	1	Dokumen			
		Barang Dan Jasa	8,000,000	0.02	3,000,000	38	37.5					0.03	0.01	
2.11	1.01.02.1.01.02.01.00.09.03	Penyusunan Renstra Skpd	10,000,000	0.02					Adanya Renstra Skpd	1	Dokumen			

Halaman 2

TOSHIBA														
20.4	1.01.02.1.01.02.01.00.33.05	Koordinasi Dan Konsolidasi Perencanaan Program/kegiatan	25,000,000	0.05					Tersedianya Bahan Usulan Rencana Program/kegiatan	1	Paket			
		Barang Dan Jasa	25,000,000	0.05										
		JUMLAH	45,534,196,312	100	8,154,241,796	24.34	17.91							

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KEADAAN BULAN JULI - SEPTEMBER
SUMBER DANA APBD

NO	KODE	SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA /DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN(RP)	REALISASI (%)		INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERtimbang		PPTK/PELAKSANA	KET.
						FISIK	KEUANGAN	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)		
	1.01.02.01.00	Dinas Kesehatan											
	1.01.02.1.01.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,355,816,200										
1.1	1.01.02.1.01.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	262,600,000	0.58				Terbaharnya Biaya Telpon, Air Dan Listrik	1 Bulan				
		-Barang Dan Jasa	262,600,000	0.58	139,479,663	53	53.11			0.85	0.31		
1.2	1.01.02.1.01.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	142,000,000	0.31				Tersedianya Bhn/ops Dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas/operasional	1 Bulan				
		-Barang Dan Jasa	142,000,000	0.31	65,547,072	46	46.16			0.48	0.14		
1.3	1.01.02.1.01.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	0.02				Adanya Bahan Bacaan Dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Bulan				
		-Barang Dan Jasa	10,000,000	0.02	1,740,000	17	17.4			0.17	0		
1.4	1.01.02.1.01.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	394,950,000	0.87				Adanya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Paket				
		-Barang Dan Jasa	394,950,000	0.87	70,046,260	18	17.74			0.99	0.15		
1.5	1.01.02.1.01.02.01.00.01.19	Pelaksanaan Pelelangan/peogadaan Barang & Jasa	15,000,000	0.03				Terlelangnya Paket Pekerjaan Di Dinas Kesehatan	1 Paket				
		-Pegawai	7,500,000	0.02	1,550,000	21	20.67			0.11	0		
		-Barang Dan Jasa	7,500,000	0.02									
1.6	1.01.02.1.01.02.01.00.01.20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	312,600,000	0.69				Adanya Koordinasi/peninjauan Lapangan	1 Paket				
		-Barang Dan Jasa	312,600,000	0.69	125,070,000	39	40.01			0.15	0.27		
1.7	1.01.02.1.01.02.01.00.01.21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	4,218,666,200	9.26				Lancarannya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun				
		-Barang Dan Jasa	4,218,666,200	9.26	2,015,938,000	49	47.79			0.04	4.43	Sutrisno, Amg, Se	
		Program Peningkatan Saran, Dan Prasarana Aparatur	368,500,000										
1.8	1.01.02.1.01.02.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100,000,000	0.22				Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit				
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	41,616,000	42	41.62			0.03	0.09	Sutrisno, Amg, Se	

1.2	1.01.02.1.01.02.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	150,000,000	0.33				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	1 Unit				
		-Barang Dan Jasa	150,000,000	0.33	30,000,000	45	30			0.63	0.07		
1.3	1.01.02.1.01.02.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	118,500,000	0.26				Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit				
		-Barang Dan Jasa	118,500,000	0.26	24,730,000	31	20.87			0.02	0.05	Sutrisno, Amg, Se	
1.4	1.01.02.1.01.02.01.00.03.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40,000,000										
1.1	1.01.02.1.01.02.01.00.03.06	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	40,000,000	0.09				Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Kesehatan (Medis & Paramedis)	1 Paket				
		-Pegawai	20,300,000	0.04	4,310,000	22	21.23			0.02	0.01		
		-Barang Dan Jasa	19,700,000	0.04	5,047,000	26	25.62			0.02	0.01		
1.6	1.01.02.1.01.02.01.00.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000										
4.1	1.01.02.1.01.02.01.00.05.04	Diklat Tehnis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns	100,000,000	0.22				Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	1 Paket				
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	72,535,000	73	72.54			0.05	0.16		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	21,000,000										
5.1	1.01.02.1.01.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Rptslr Realisasi Kinerja Skpd	3,000,000	0.01				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Skpd	1 Dokumen				
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	2,694,100	100	89.8			0.07	0.01		
5.2	1.01.02.1.01.02.01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran Dan Akhir Tahun	15,000,000	0.03				Tersusunnya Pelaporan Keuangan	1 Dokumen				
		-Barang Dan Jasa	15,000,000	0.03									
5.3	1.01.02.1.01.02.01.00.06.05	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	3,000,000	0.01				Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	1 Dokumen				
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01									
		Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Skpd	24,000,000										
6.1	1.01.02.1.01.02.01.00.09.01	Penyusunan Rka Skpd	3,000,000	0.01				Tersusunnya Rka Skpd	1 Dokumen				
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	3,000,000	100	100			0.07	0.01		
6.2	1.01.02.1.01.02.01.00.09.02	Penyusunan Dpa Skpd	8,000,000	0.02				Tersusunnya Dpa Skpd	1 Dokumen				
		-Barang Dan Jasa	8,000,000	0.02	3,000,000	38	37.5			0.03	0.01		
6.3	1.01.02.1.01.02.01.00.09.03	Penyusunan Renstra Skpd	10,000,000	0.02				Adanya Renstra Skpd	1 Dokumen				

20.4	1.01.02.1.01.02.01.00.33.05	Koordinasi Dan Konsolidasi Perencanaan Program/kegiatan	25,000,000	0.05						Tersedianya Bahan Usulan Rencana Program/kegiatan
		-Barang Dan Jasa	25,000,000	0.05						
JUMLAH			45,534,196,312	100	10,260,806,329	35.33	22.53			

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KEADAAN BULAN OKTOBER - DESEMBER
SUMBER DANA APBD

NO	KODE	SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA /DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN(RP)	REALISASI (%)		INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG		PPT
						FISIK	KEUANGAN	NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
	1.01.02.01.00	Dinas Kesehatan										
	1.01.02.1.01.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,355,816,200									
1.1	1.01.02.1.01.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	262,600,000	0.58				Terbayarnya Biaya Telpon, Air Dan Listrik	1 Bulan			
		-Barang Dan Jasa	262,600,000	0.58	230,643,993	100	87.83			1.61	0.51	
1.2	1.01.02.1.01.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	142,000,000	0.31				Tersedianya Bbm/gas Dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas/operasional	1 Bulan			
		-Barang Dan Jasa	142,000,000	0.31	125,156,561	100	88.14			1.05	0.27	
1.3	1.01.02.1.01.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	0.02				Adanya Bahan Bacaan Dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Bulan			
		-Barang Dan Jasa	10,000,000	0.02	9,990,000	100	99.9			1.03	0.02	
1.4	1.01.02.1.01.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	394,950,000	0.87				Adanya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Paket			
		-Barang Dan Jasa	394,950,000	0.87	394,623,897	100	99.92			0.53	0.87	
1.5	1.01.02.1.01.02.01.00.01.19	Pelaksanaan Pelelangan/pengadaan Barang & Jasa	15,000,000	0.03				Terlelangnya Paket Pekerjaan Di Dinas Kesehatan	1 Paket			
		-Pegawai	7,500,000	0.02	7,500,000	100	100			0.52	0.02	
		-Barang Dan Jasa	7,500,000	0.02	7,500,000	100	100			0.51	0.02	
1.6	1.01.02.1.01.02.01.00.01.20	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	312,600,000	0.69				Adanya Koordinasi/peninjauan Lapangan	1 Paket			
		-Barang Dan Jasa	312,600,000	0.69	312,490,000	100	99.96			0.37	0.69	
1.7	1.01.02.1.01.02.01.00.01.21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	4,218,666,200	9.26				Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			
		-Barang Dan Jasa	4,218,666,200	9.26	4,213,066,200	100	99.87			0.08	9.25	Sutrisna
	1.01.02.1.01.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	168,500,000									
2.1	1.01.02.1.01.02.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100,000,000	0.22				Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit			
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	100,000,000	100	100			0.98	0.22	Sutrisna

2.2	1.01.02.1.01.02.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	150,000,000	0.33				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit			
		-Barang Dan Jasa	150,000,000	0.33	149,990,000	100	99.99				0.08	0.33
2.3	1.01.02.1.01.02.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	118,500,000	0.26				Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit			
		-Barang Dan Jasa	118,500,000	0.26	118,315,000	100	99.84				0.07	0.26
	1.01.02.1.01.02.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40,000,000									
3.1	1.01.02.1.01.02.01.00.03.06	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	40,000,000	0.09				Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Kesehatan (Medis & Paramedis)	1 Paket			
		-Pegawai	20,300,000	0.04	19,600,000	100	96.55				0.07	0.04
		-Barang Dan Jasa	19,700,000	0.04	19,700,000	100	100				0.07	0.04
	1.01.02.1.01.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000									
4.1	1.01.02.1.01.02.01.00.05.04	Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns	100,000,000	0.22				Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	1 Paket			
		-Barang Dan Jasa	100,000,000	0.22	99,999,192	100	100				0.07	0.22
	1.01.02.1.01.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	21,000,000									
5.1	1.01.02.1.01.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	3,000,000	0.01				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Skpd	1 Dokumen			
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	2,694,100	100	89.8				0.07	0.01
5.2	1.01.02.1.01.02.01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran Dan Akhir Tahun	15,000,000	0.03				Tersusunnya Pelaporan Keuangan	1 Dokumen			
		-Barang Dan Jasa	15,000,000	0.03	15,000,000	100	100				0.07	0.03
5.3	1.01.02.1.01.02.01.00.06.05	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	3,000,000	0.01				Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	1 Dokumen			
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	3,000,000	100	100				0.07	0.01
	1.01.02.1.01.02.01.00.09	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Skpd	24,000,000									
6.1	1.01.02.1.01.02.01.00.09.01	Penyusunan Rka Skpd	3,000,000	0.01				Tersusunnya Rka Skpd	1 Dokumen			
		-Barang Dan Jasa	3,000,000	0.01	3,000,000	100	100				0.07	0.01
6.2	1.01.02.1.01.02.01.00.09.02	Penyusunan Dpa Skpd	8,000,000	0.02				Tersusunnya Dpa Skpd	1 Dokumen			
		-Barang Dan Jasa	8,000,000	0.02	8,000,000	100	100				0.07	0.02
6.3	1.01.02.1.01.02.01.00.09.03	Penyusunan Renstra Skpd	10,000,000	0.02				Adanya Renstra Skpd	1 Dokumen			

20.4	1.01.02.1.01.02.01.00.33.05	Koordinasi Dan Konsolidasi Perencanaan Program/kegiatan	25,000,000	0.05				Tersedianya Bahan Usulan Rencana Program/kegiatan	1 Paket			
		-Barang Dan Jasa	25,000,000	0.05	24,000,000	100	96					
		JUMLAH	45,534,196,312		100	39,777,081,661	98.17	87.36				

BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi berjudul "Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang" adalah Rina Angriani. Ia lahir di Enrekang, 13 November 1996. Ia anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Umar dan Ibu Nurmayani. Menyelesaikan Pendidikan Dasar TK Pertiwi Kabupaten Enrekang pada tahun 2002. Lulus Pendidikan Dasar SD 117 Enrekang pada tahun 2008. Ia lulus dari Sekolah Menengah Pertama tahun 2011 di SMPN 1 Enrekang dan lulus dari SMAN 1 Enrekang pada tahun 2014. Mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.